

Judul : Untukantisipasi dampak aksi unjuk raja, PJJ demi keamanan belajar
Tanggal : Selasa, 02 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Untuk Antisipasi Dampak Aksi Unjuk Rasa

PJJ Demi Keamanan Belajar

Gelombang aksi demo yang terjadi di berbagai daerah membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Berbagai sekolah di beberapa provinsi memberlakukan kebijakan belajar dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dimulai hari Senin, 1 September 2025.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya akan membahas imbauan PJJ bagi sekolah yang di dekat lokasi demonstrasi. Dia menyebut hasil rapat akan diumumkan segera.

"Jadi akan kita bahas malam ini, malam ini kita akan rapim di kementerian membahas itu," kata Mu'ti di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengimbau pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH) dan belajar dari rumah

(BDR) pada Senin, 1 September 2025. Imbauan tersebut tertuang dalam dua surat edaran (SE) yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnaker) serta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi dampak aksi unjuk rasa di sejumlah titik ibu kota yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Kebijakan PJJ juga diberlakukan di beberapa Kabupaten Kota. Diantaranya Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Bogor (Kab dan kota), Bekasi, Sukabumi, Bandung, Majalengka, Tangerang Selatan, Tangerang, Yogyakarta, Banjarmasin, Surabaya, Kediri, Malang, Kendari, dan Makassar. Sedangkan di kota Depok untuk jenjang PAUD-SMP tetap melakukan pembelajaran tatap muka biasa.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim mendorong agar PJJ yang dilakukan guru tetap berkualitas, interaktif, dan bermakna bagi murid.

Selain itu, Satriawan Salim, meminta agar PJJ yang digelar kemarin harus dievaluasi apakah efektif atau tidak.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani tak memperlakukan jika kebijakan PJJ dipermasalahkan. Baginya, PJJ yang diberlakukan di berbagai daerah sudah tepat.

"Demi keamanan dan kenyamanan anak didik. Kita support," katanya.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Lalu Hadrian Irfani dan Satriawan Salim terkait dengan kebijakan PJJ di berbagai daerah.

SATRIWAN SALIM

Koordinator Nasional P2G

PJJ Harus Berkualitas Dan Lebih Bermakna



“DPR-RI”

Tentu kebijakan demikian akan menjadi beban baru bagi guru, apalagi yang sudah berkeluarga, termasuk siswa.

Kemarin, Pemerintah melalui Mendikdasmen mengutarakan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR) akibat maraknya aksi demo. Bagaimana tanggapan Anda?

Kami meminta Mendikdasmen evaluasi efektivitas PJJ di 3 Provinsi dan 20 Kabupaten dan Kota.

Penda yang menerapkan PJJ untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PJJ hari pertama 1 September 2025 ini. Termasuk kehadiran siswa dan guru. Begitu pula Mendikdasmen dan Kemendiknas melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PJJ/BDR.

Kemarin, Pemerintah melalui Mendikdasmen mengutarakan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR) akibat maraknya aksi demo. Bagaimana tanggapan Anda?

Kemendikdasmen dan Kemendiknas perlu, sebuah kebijakan tiap provinsi atau kabupaten/kota masing-masing berbeda.

Bisa dijelaskan perbedaannya? Ada yang PJJ 1 - 2 September ada pula yang tanggal 1 - 4 September, dan ada yang hanya 1 hari saja seperti madrasah di Jakarta.

Wilayah mana saja yang melakukan PJJ? Kami mencatat berdasarkan laporan dari jaringan di daerah, ada beberapa wilayah menerapkan PJJ/BDR yang dilakukan lintas-jenjang sekolah, baik di level provinsi maupun kota. Kebijakan PJJ/BDR yang dikehendaki oleh tiga (3) Dinas Pendidikan Provinsi. Yakni DKI

Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Temuan P2G lain misalnya di kota Tasikmalaya, siswa dan guru jenjang SMA/SMK melaksanakan PJJ, namun berdasarkan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Nomor: 3936/PK/01/CADES/DIR/WIL.XII, bertanggal 29 Agustus 2025 menginstruksikan guru dan siswa pulang sekolah pada pukul 17.00 WIB sore (poin nomor 4). Para guru dan siswa mengeluh sebab pulang sekolah makin sore dari biasanya.

Tentu kebijakan demikian akan menjadi beban baru bagi guru apalagi yang sudah berkeluarga, termasuk siswa, memberatkan bagi yang jarak rumah ke sekolah relatif jauh. **REN**

LALU HADRIAN IRFANI

Wakil Ketua Komisi X DPR

Kebijakan PJJ Agar Aman & Nyaman



Provinsi yang menerapkan PJJ itu karena tingkat chaos-nya cukup tinggi. Seperti Jakarta dan Jawa Barat.

Ada desakan agar kebijakan PJJ yang diberlakukan di beberapa daerah perlu dievaluasi. Apa pendapat Anda?

Semua orang bisa menyuarakan aspirasi dan pendapatnya masing-masing. Tapi, kalau menurut saya, selama kebijakan itu dibuat untuk mengamankan siswa dan para guru, pada prinsipnya saya mendukung kebijakan PJJ di berbagai daerah.

Apalagi, demi keamanan dan kenyamanan anak didik. Kita support.

Bagaimana dengan provinsi lain? Bagi provinsi yang kondusif, aman dan tidak ada gejolak aksi demo tidak perlu memberlakukan program PJJ. Program pendidikan tetap dilakukan seperti biasanya.

Kenapa provinsi yang lain tidak diberlakukan?

Provinsi yang menerapkan PJJ itu karena tingkat chaos-nya cukup tinggi. Seperti Jakarta dan Jawa Barat. Sangat wajar jika diberlakukan di provinsi tersebut.

Bagaimana dengan provinsi lain? Bagi provinsi yang kondusif, aman dan tidak ada gejolak aksi demo tidak perlu memberlakukan program PJJ. Program pendidikan tetap dilakukan seperti biasanya.

Jika tidak PJJ. Apa yang musti dilakukan?

Penda atau dinas pendidikan daerah yang kondusif dan aman, bisa memundurkan jam masuk belajarnya. Yang terpenting, dengan memundurkan jam belajar, tapi tidak mengurangi substantif dari pembelajaran yang selama ini dilakukan.

Meski begitu, orang tua harus ikut mengawasi anak-anaknya. Tidak boleh lepas dari pengawasan orang tua karena banyak siswa yang ikut melakukan aksi demonstrasi.

Makanya, perlu peran orang tua dalam memantau anak-anaknya.

Bagaimana jika ada siswa yang melakukan aksi demo?

Tentu harus dipanggil orang tuanya karena kebanyakan yang melakukan aksi demo adalah anak SMA dan SMK. **REN**